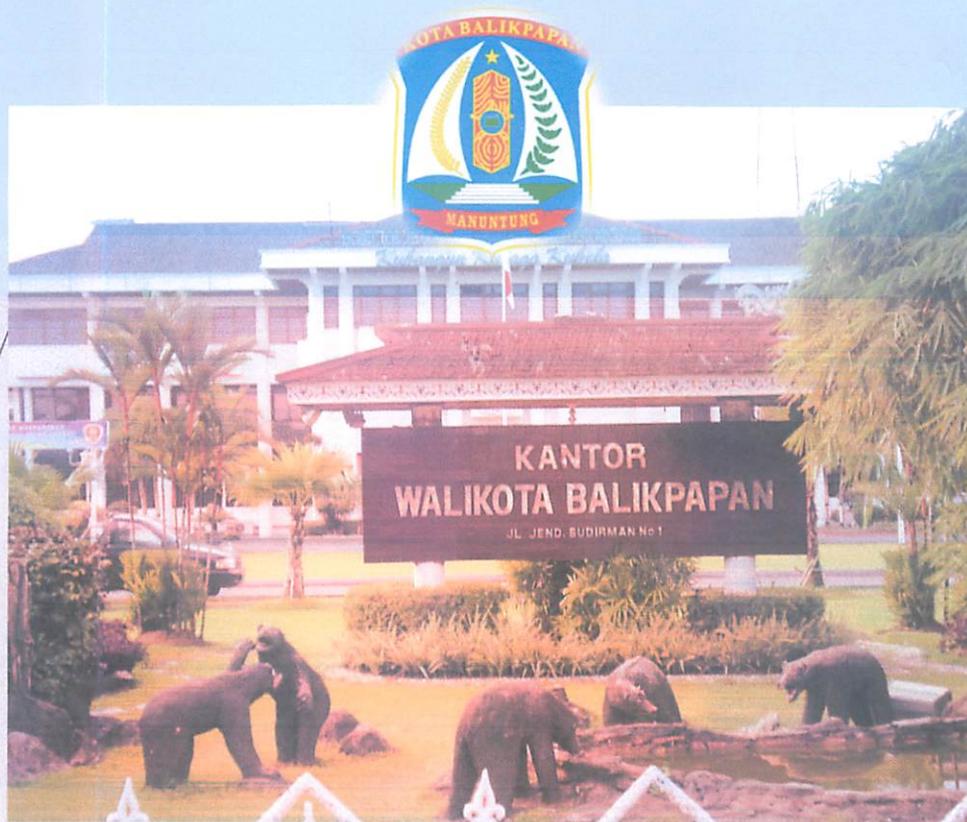


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dikaruniai kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2016.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP sendiri berpedoman pada Peraturan Men PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Balikpapan, Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN. FADLI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2011-2016 adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN KOORDINASI YANG EFEKTIF MENUJU KEPEREMINTAHAN YANG BAIK”.

Sesuai dengan Visi tersebut maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan 5 (Lima) Misi yaitu : (1) Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum, (2) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, (3) Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, (4) Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik dan (5) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja yang memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra

Tahun 2016 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2011 – 2016. Matrik Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 6 Sasaran Strategis dan 50 Indikator Sasaran,

maka capaian indikator sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Dari penilaian indikator maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan" dengan rata-rata capaian sebesar 118,09% atau kategori Sangat Tinggi
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Penataan Perundang-undangan" dengan rata-rata capaian sebesar 104 % atau Sangat Tinggi
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Hubungan Kerja" dengan rata-rata capaian sebesar 70,63% atau Kategori Sedang
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Profesional dan Kesejahteraan Aparatur" dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau Sangat Tinggi
5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan Ketatalaksanaan, Kelembagan dan Akuntabilitas Kinerja, Meningkatkan Profesional dan Kesejahteraan Aparatur" dengan rata-rata capaian sebesar 85,71% atau Kategori Tinggi
6. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana" dengan rata-rata capaian sebesar 182,35% atau Sangat Tinggi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 dengan nilai rata-rata 110,13 dikategorikan Sangat Tinggi.

Balikpapan, Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN. FADLI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Landasan Hukum	2
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Aspek Strategis	4
4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5
5. Susunan Organisasi	5
6. Sumber Daya Manusia	7
7. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
1. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2016	9
2. Rencana Kerja Tahunan 2016	19
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	28
2. Analisis Capaian Kinerja	33
3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	60
4. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	62
6. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	66
2. Saran	68

Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :

- 1.1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 1.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 1.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
- 1.13. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1. Kedudukan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah Wali Kota Balikpapan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

2.2. Tugas

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif

2.3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut

- 2.3.1. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
- 2.3.2. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah lainnya;
- 2.3.3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- 2.3.4. pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa
- 2.3.5. pelayanan administratif perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah lainnya
- 2.3.6. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- 2.3.7. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- 2.3.8. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- 2.3.9. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah
- 2.3.10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan meliputi :

- 3.1. Adanya keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- 3.2. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 3.3. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3.4. Adanya sistem pelayanan yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
- 3.5. Tersedianya aparatur yang professional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat.

4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain adalah manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

5. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

5.1. Asisten Tata Pemerintahan, dibantu :

- 5.1.1. Bagian Pemerintahan
- 5.1.2. Bagian Humas dan Protokol
- 5.1.3. Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah, dan Pertanahan
- 5.1.4. Bagian Hukum

5.2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu :

- 5.2.1. Bagian Perekonomian
- 5.2.2. Bagian Pembangunan
- 5.2.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

5.3. Asisten Administrasi Umum, dibantu :

- 5.3.1. Bagian Organisasi
- 5.3.2. Bagian Keuangan
- 5.3.3. Bagian Umum dan Perlengkapan

5.4. Staf Ahli, terdiri dari :

- 5.4.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- 5.4.2. Staf Ahli Bidang Perhubungan dan Manajemen Perkotaan;
- 5.4.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- 5.4.4. Staf Ahli Bidang Perekonomian;
- 5.4.5. Staf Ahli Bidang Sosial.

BAB I PENDAHULUAN

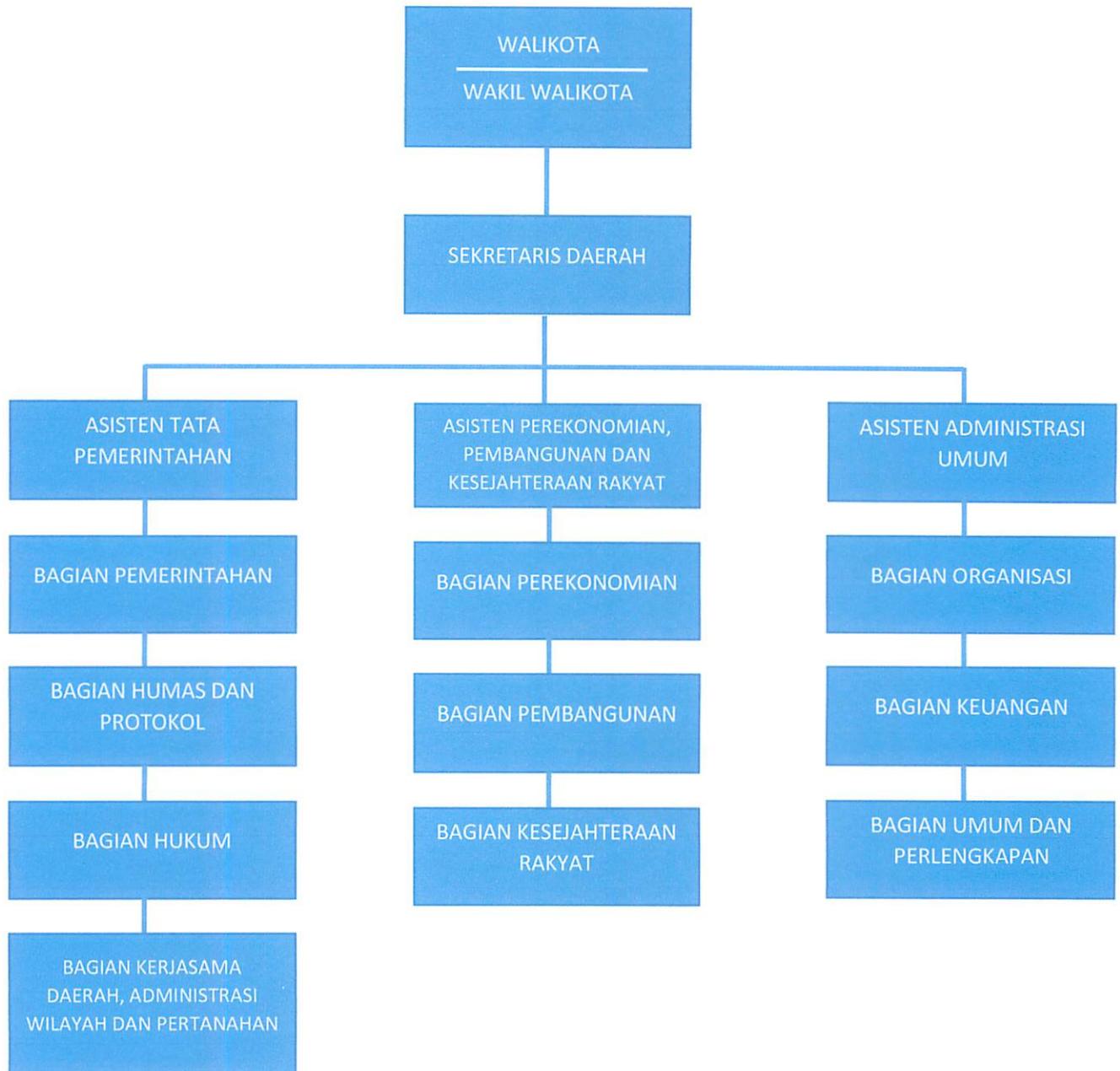
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sertabebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



6. Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data Simpeg Tahun 2016 sebanyak 297 orang

Tabel 6.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Naban	Jumlah
1	Lingkup Sekda	1	0	0	0	1	2	0	1	5
2	Lingkup Staf Ahli	5	0	0	0	0	2	0	1	8
3	Lingkup Asisten	3	0	0	0	0	5	0	3	11
4	Lingkup Bagian Pemerintahan	0	1	3	1	3	1	0	5	14
5	Lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan	0	1	3	0	5	35	4	42	91
6	Lingkup Bagian Humas dan Protokol	0	1	3	0	11	5	0	13	33
7	Lingkup Bagian Pembangunan	0	1	3	0	18	7	0	19	48
8	Lingkup Bagian Organisasi	0	1	3	0	7	3	0	4	18
9	Lingkup Bagian Keuangan	0	1	3	0	2	4	0	6	16
10	Lingkup Bagian KDAWP	0	1	3	0	6	4	0	3	17
11	Lingkup Bagian Ekonomi	0	1	3	0	2	1	0	3	10
12	Lingkup Bagian Kesra	0	1	3	0	4	1	1	4	14
13	Lingkup Bagian Hukum	0	1	3	0	4	1	0	3	12

7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKjIP Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan diuraikan pula tentang Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategis Tahun 2011-2016

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Kota Balikpapan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi lebih akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN KOORDINASI YANG EFEKTIF MENUJU KEPERINTAHAN YANG BAIK".

1.2. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merumuskan misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

- 1.2.1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum.
- 1.2.2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.
- 1.2.3. Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
- 1.2.4. Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.
- 1.2.5. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat yang tertib hukum.	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima	1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat
2. Peningkatan kesadaran hukum	2. Melaksanakan penataan perundang-undangan

Misi 2 : Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.	
TUJUAN	SASARAN
3. Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi	3. Meningkatnya hubungan kerja

Misi 3 : Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	
TUJUAN	SASARAN
4. Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur	4. Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur Mengembangkan kompetensi aparatur

Misi 4 : Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

TUJUAN	SASARAN
5. Optimalisasi kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas	5. Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja

Misi 5 : Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

TUJUAN	SASARAN
6. Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana	6 Peningkatan sistem pengelolaan sarana prasarana

1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah

Demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Jumlah RT 2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4. Jumlah prestasi/penghargaan yang diterima Kota Balikpapan(Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional) 5. Persentase penduduk yang memiliki KTP 6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM 8. Angka kemiskinan 9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Humpro DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL Bagian Organisasi Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan Bagian Kesra

		11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	Bagian Kesra
		12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	Bagian Organisasi
		13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	Bagian Pembangunan
		14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	Bagian Pembangunan
		15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	Bagian Pembangunan
		16. Persentase penyelesaian pertanahan	Bagian KDAWP
		17. Nilai investasi	Bagian Perekonomian
		18. Angka inflasi dan PDRB	Bagian Perekonomian
		19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	Bagian Perekonomian
		20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	Bagian Perekonomian
		21. Penganekaragaman pangan	Bagian Perekonomian
		22. Persentase realisasi anggaran	Bagian Keuangan
		23. Persentase administrasi batas wilayah	Bagian KDAWP
		24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	Bagian Pemerintahan

		25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	Bagian KDAWP
		26. Angka kriminalitas	Fungsional Polres
		27. Cakupan penanganan bencana	Bagian Pemerintahan
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	Bagian Hukum
		29. Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	Bagian Hukum
		30. Jumlah : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perda ➤ Perwal ➤ Keputusan 	Bagian Hukum
		31. Persentase keluarga sadar hukum	Bagian Hukum
		32. Persentase penyelesaian perkara hukum	Bagian Hukum
3.	Meningkatnya hubungan kerja	33. Jumlah <i>coffee morning</i>	Bagian Humpro
		34. Jumlah rapat MUSPIDA	Bagian Umum dan
		35. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	Perlengkapan
		36. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	Bagian Pemerintahan
		37. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	Bagian Humpro
		38. Jumlah jumpa pers	Bagian Humpro
		39. Jumlah talk show	Bagian Humpro
		40. Jumlah kerjasama	Bagian KDAWP

4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	41. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	Bagian Organisasi
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	42. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	Bagian Organisasi
		43. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	Bagian Organisasi
		44. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	Bagian Pembangunan
		45. Persentase SKPD yang memiliki SOP	Bagian Organisasi
		46. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	Bagian Organisasi
		47. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	Bagian Organisasi
		48. Persentase PPID Pembantu di SKPD	Bagian Humpro
		6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana

1.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.5.1. Strategi :

- 1.5.1.1. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan daerah
- 1.5.1.2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah
- 1.5.1.3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah
- 1.5.1.4. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan
- 1.5.1.5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administrative bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 1.5.1.6. Meningkatkan pengendalian dan system informasi pembangunan daerah
- 1.5.1.7. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja
- 1.5.1.8. Menyusun konsep kebijakan penegakan disiplin aparatur, peningkatan etos dan budaya kerja dan pemberdayaan aparatur daerah
- 1.5.1.9. Melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah serta analisis formasi jabatan
- 1.5.1.10. Menyusun rencana dan merumuskan ketatalaksanaan, system dan prosedur tata kerja dan tertib administrasi kedinasan
- 1.5.1.11. Meningkatkan penyebaran informasi program Good Governance
- 1.5.1.12. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan perekonomian dan pembangunan
- 1.5.1.13. Menyiapkan rencana kebijakan program social dan kesra

1.5.2. Kebijakan

- 1.5.2.1. Pembinaan dan pengawasan tugas-tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 1.5.2.2. Desentralisasi urusan wajib dan urusan pilihan serta model perencanaan dari bawah yang serasi dengan model perencanaan daerah
- 1.5.2.3. Standarisasi administrasi pemerintahan
- 1.5.2.4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
- 1.5.2.5. Menindaklanjuti regulasi aturan pemerintah pusat dan menyelaraskan aturan daerah dan pusat

1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka ditetapkanlah Program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya kinerja di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PROGRAM

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan/ kelurahan
2. Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
4. Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
5. Penyebarluasan Informasi Daerah
6. Kerjasama Informasi dan media massa
7. Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Penataan Peraturan Perundang-undangan
9. Bantuan Hukum
10. Penyusunan dan evaluasi anggaran
11. penyusunan laporan dan realisasi anggaran
12. Penyempurnaan sarana dan prasarana fisik dan administrasi pamong praja
13. Pengembangan sistem pelaporan
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Fasilitasi permasalahan pertanahan
16. Percepatan tapal batas wilayah administrasi daerah
17. Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan ijin membuka/memanfaatkan tanah negara
18. Ketahanan pangan
19. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
20. Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23. Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan

2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

Rencana Kerja Tahunan adalah rencana selama setahun yang disusun untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran sekretariat daerah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	2	3
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan masyarakat	1 Jumlah RT 2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional) 5 Persentase penduduk yang memiliki KTP 6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan) 8 Angka kemiskinan 9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti 11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti 12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi 13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung 14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa 15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan

		16	Persentase penyelesaian pertanahan
		17	Nilai investasi
		18	Angka inflasi dan PDRB
		19	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi
		20	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas
			a. Jumlah angkutan
			b. Jumlah pasar tradisional
			c. Jumlah rumah sakit
			d. Jumlah hotel
			e. Jumlah restoran
			f. Jumlah toko/supermarket
			g. Jumlah bank
			h. Ketersediaan listrik
		21	Penganekaragaman pangan
		22	Persentase realisasi anggaran
		23	Persentase administrasi batas wilayah
		24	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib
		25	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara
		26	Angka kriminalitas
		27	Cakupan penanganan bencana
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28	Persentase penerbitan Peraturan Daerah
		29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya
		30	Jumlah :
			1. Perda
			2. Perwal
			3. Keputusan
		31	Persentase keluarga sadar hukum
		32	Persentase penanganan perkara hukum
3	Meningkatnya hubungan kerja	33	Jumlah <i>coffee morning</i>
		34	Jumlah rapat MUSPIDA
		35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan

		36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah
		37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>
		38	Jumlah jumpa pers
		39	Jumlah talk show
		40	Jumlah kerjasama
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD
		43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu
		44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu
		45	Persentase SKPD yang memiliki SOP
		46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan
		47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP
		48	Persentase PPID Pembantu di SKPD
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	49	Tersedianya rencana kebutuhan barang
		50	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

3. PERJANJIAN KINERJA 2016

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. perjanjian kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 mengalami perubahan seiring dengan perjanjian APBD Perubahan Tahun 2016.

Secara rinci, perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan masyarakat	1 Jumlah RT	1.671
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 Kelurahan
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	300 RT
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	93%
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	77.50%
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	100%
		8 Angka kemiskinan	2.35%
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	75%
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	75%
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	68

	13	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL = 70% BTL = 30%	
	14	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	85%	
	15	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 Buku	
	16	Persentase penyelesaian pertanahan	25 Rapat	
	17	Nilai investasi	10 T	
	18	Angka inflasi dan PDRB	6%	
	19	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5%	
	20	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas		
		a. Jumlah angkutan	3150	
		b. Jumlah pasar tradisional	19	
		c. Jumlah rumah sakit	13	
		d. Jumlah hotel	74	
		e. Jumlah restoran	480	
		f. Jumlah toko/supermarket	650	
		g. Jumlah bank	180	
		h. Ketersediaan listrik	450000	
	21	Penganekaragaman pangan	0	
	22	Persentase realisasi anggaran	96%	
	23	Persentase administrasi batas wilayah	39 Pilar	
	24	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16 Kegiatan	
	25	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1400 IMTN	
	26	Angka kriminalitas	2.384 kejadian	
	27	Cakupan penanganan bencana	250 Ja dian	
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%
		29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	68 Kegiatan
		30	Jumlah :	
			1. Perda	10
			2. Perwal	40
			3. Keputusan	400

3	Meningkatnya hubungan kerja	31	Persentase keluarga sadar hukum	10 Kelurahan
		32	Persentase penanganan perkara hukum	100%
		33	Jumlah <i>coffee morning</i>	52
		34	Jumlah rapat MUSPIDA	-
		35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	80 kunker
		36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	350
		37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%
		38	Jumlah jumpa pers	25
		39	Jumlah talk show	18
		40	Jumlah kerjasama	6 Kegiatan
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%
		43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%
		44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	95%
		45	Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%
		46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%
		47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	85%
		48	Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%
		6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	49
50	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi			17 Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	450.000.000,00	APBD
2	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.462.545.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	366.420.500,00	APBD
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18.357.900.000,00	APBD
5	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	1.800.480.000,00	APBD
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	641.000.000,00	APBD
7	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	404.900.000,00	APBD
8	Program Penataan perundang-undangan	2.519.554.000,00	APBD
9	Program Bantuan Hukum	536.380.000,00	APBD
10	Program Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	159.573.000,00	APBD
11	Program Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran	140.973.000,00	APBD
12	Program Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Fisik dan Administrasi Pamon Praja	1.883.780.000,00	APBD
13	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	2.202.039.000,00	APBD
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.295.550.000,00	APBD
15	Program Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	100.000.000,00	APBD
16	Program Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah	1.663.000.000,00	APBD
17	Program Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara	1.500.000.000,00	APBD
18	Program Ketahanan Pangan	1.071.591.192,00	APBD
19	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.162.350.000,00	APBD
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	420.000.000,00	APBD
21	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	638.000.000,00	APBD
22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	880.931.000,00	APBD
23	Program Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	800.000.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengungkapan kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja yang dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja. Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 memiliki sasaran sebanyak 6 (Enam) sasaran dan 50 (Lima Puluh) indikator kinerja yaitu :

Sasaran 1 terdiri dari 27 indikator kinerja

Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator kinerja

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja

Sasaran 5 terdiri dari 7 indikator kinerja

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja

Evaluasi Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis. Formulasi penghitungan capaian kinerja LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Formula 1 :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\frac{\sum \text{REALISASI}}{\sum \text{TARGET}} \times 100\%$$

Formula 2 :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah

$$\frac{(2 \times \sum \text{TARGET}) - \sum \text{REALISASI}}{\sum \text{TARGET}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan Pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2016

ini Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat capaian dan analisa sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No	Indikator kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra 2016	Capaian d. 2016 terhadap 2016
			Target	Realisasi	%		
1	Jumlah RT	1.671	1.671	1.677	100,36	1.671	100,36
2	Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 Kel	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	6 Kelurahan	100
3	Persentase RT yang memiliki administrasi baik	33	300 RT	300 RT	100	300 RT	100
4	Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48	48	70	145,83	48	145,83
5	Persentase penduduk yang memiliki KTP	94,36%	93%	88,22%	94,86	93%	94,86
6	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	80,13%	77,50%	33,27%	42,92	77,50%	42,92
7	Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	100%	100%	100%	100	100%	100
8	Angka kemiskinan	137,2	2.35%	2.91%	76,00	2.35%	76,00
9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	22 %	75%	55,47%	73,63	75%	73,63
10	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti	0,99%	75%	0%	0	75%	0
11	Persentase permohonan hibah yang dapat ditindaklanjuti	84,70%	90%	50%	55,56	90%	55,56
12	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	67	68	68	100	68	100
13	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL : 69 % BTL : 31 %	BL = 70% BTL=30%	BL=59% BTL= 40%	108,81	BL = 70% BTL = 30%	108,81
14	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	83 %	85%	86,70%	102	85%	102
15	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 buku	76 Buku	76 Buku	100	76 Buku	100
16	Persentase penyelesaian pertanahan	25 rapat, 4 rakor	25 Rapat	25 rapat	100	25 Rapat	100
17	Nilai investasi	18,87 T	10 T	24,59 T	245.90	10 T	245.90
18	Angka inflasi dan PDRB	7,90%	6%	4.13%	68,83	6%	68,83
19	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.98%	5%	1,56%	31,20	5%	31,20
20	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	8 Keg					
	a. Jumlah angkutan		3150	2525	80.16	3150	80.16
	b. Jumlah pasar tradisional		19	21	110.53	19	110.53

No	Indikator kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra 2016	Capaian s.d. 2016 terhadap 2016
			Target	Realisasi	%		
	c. Jumlah rumah sakit		13	12	92.31	13	92.31
	d. Jumlah hotel		74	75	101.35	74	101.35
	e. Jumlah restoran		480	381	79.38	480	79.38
	f. Jumlah toko/supermarket		650	683	105.08	650	105.08
	g. Jumlah bank		180	185	102.78	180	102.78
	h. Ketersediaan listrik		450000	556.692 kVA	123.71	450000	123.71
21	Penganekaragaman pangan	0	0	0	0	0	0%
22	Persentase realisasi anggaran	93,56%	96%	88,33%	92.01	96%	92.01
23	Persentase administrasi batas wilayah	PBU : 15, PBA : 16	39 Pilar	0 Pilar	0	39 Pilar	0
24	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16	16 Kegiatan	5 Kegiatan	31.25	16 Kegiatan	31.25
25	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	3.763 Bidang	1400 IMTN	3622 IMTN	258.71	1400 IMTN	258.71
26	Angka kriminalitas	2.384	2.384 kejadian	2.208 Kejadian	92,62	2.384 kejadian	92,62
27	Cakupan penanganan bencana	394	250	431	172,40	431	172,40
28	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	87 %	100%	100%	100	100%	100
29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	68 Kegiatan	68 Kegiatan	34 Kegiatan	50	68 Kegiatan	50
30	Jumlah :						
	1. Perda	13	10	11	110	10	110
	2. Perwal	44	40	60	150	40	150
	3. Keputusan	520	400	510	127.5	400	127.5
31	Persentase keluarga sadar hukum	100 %	10 Kelurahan	0 Kelurahan	0	10 Kelurahan	0
32	Persentase penanganan perkara hukum	100 %	100%	100%	100	100%	100
33	Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	52	100	52	100
34	Jumlah rapat MUSPIDA	15	-	-	0	-	0
35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	111	80 kunker	80 Kunker	100	80 kunker	100
36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	226	350	663	189	350	189
37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100%	100	100%	100
38	Jumlah jumpa pers	25	25	19	76	25	76
39	Jumlah talk show	18	18	6	33.33	18	33.33
40	Jumlah kerjasama	6	6 Kegiatan	6 kegiatan	100	6 Kegiatan	100
41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal	1 draft perwal	1 draft perwal	100	1 draft perwal	100
42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100%	100	100%	100

No	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra 2016	Capaian s.d. 2016 terhadap 2016
			Target	Realisasi	%		
43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%	100%	100	100%	100
44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	99,46 %	95%	95%	100	95%	100
45	Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100%	100	100%	100%
46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100%	100	100%	100%
47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	80%	85%	0%	0	85%	0
48	Persentase PPID Pembantu di SKPD	68	100%	100%	100	100%	100
49	Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	10 Bagian	10 Bagian	100	10 Bagian	100
50	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	15 kegiatan	17 Kegiatan	14 Kegiatan	82,35	17 kegiatan	82,35

Dari Pengukuran Kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2016		
				Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1	Jumlah RT	1.671	1.677	100,36
		2	Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100
		3	Persentase RT yang memiliki administrasi baik	300 RT	300 RT	100
		4	Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48	70	145,83
		5	Persentase penduduk yang memiliki KTP	93%	88,22%	94,86
		6	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	77,50%	33,27%	42,92
		7	Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	100%	100%	100%
		8	Angka kemiskinan	2,35%	2,91%	76,00
		9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	75%	55,47%	73,63
		10	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti	75%	0%	0
		11	Persentase permohonan hibah yang dapat ditindaklanjuti	90%	50%	55,56
		12	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	68	68	100
		13	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL = 70% BTL=30%	BL=59% BTL= 40%	108,81
		14	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	85%	86,70%	102
		15	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 Buku	76 Buku	100
		16	Persentase penyelesaian pertanahan	25 Rapat	25 rapat	100
		17	Nilai investasi	10 T	24,59 T	245,90
		18	Angka inflasi dan PDRB	6%	4,13%	68,83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2016		
				Target	Realisasi	%
		19	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5%	1,56%	31,20
		20	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas			
			a. Jumlah angkutan	3150	2525	80.16
			b. Jumlah pasar tradisional	19	21	110.53
			c. Jumlah rumah sakit	13	12	92.31
			d. Jumlah hotel	74	75	101.35
			e. Jumlah restoran	480	381	79.38
			f. Jumlah toko/supermarket	650	683	105.08
			g. Jumlah bank	180	185	102.78
			h. Ketersediaan listrik	450000	556.692 kVA	123.71
		21	Pengankaragaman pangan	0	0	0
		22	Persentase realisasi anggaran	96%	88,33%	92.01
		23	Persentase administrasi batas wilayah	39 Pilar	0 Pilar	0
		24	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16 Kegiatan	5 Kegiatan	31.25
		25	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1400 IMTN	3622 IMTN	258.71
		26	Angka kriminalitas	2.384 kejadian	2208 Kejadian	92.62
		27	Cakupan penanganan bencana	251	431	172,40
Rata-rata Capaian Strategis 1						115,28
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%	100%	100
		29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	68 Kegiatan	34 Kegiatan	50
		30	Jumlah :			
			1. Perda	10	11	110
			2. Perwal	40	60	150
			3. Keputusan	400	510	127,5
		31	Persentase keluarga sadar hukum	10 Kelurahan	0 Kelurahan	0
		32	Persentase penanganan perkara hukum	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Strategis 2						104,00
3	Meningkatnya Hubungan Kerja	33	Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	100
		34	Jumlah rapat MUSPIDA	-	-	0
		35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	80 kunker	80 Kunker	100
		36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	350	663	189
		37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100
		38	Jumlah jumpa pers	25	19	76
		39	Jumlah talk show	18	6	33.33
		40	Jumlah kerjasama	6 Kegiatan	6 kegiatan	100
Rata-rata Capaian Strategis 3						70,63
4	Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal	1 draft perwal	100
Rata-rata Capaian Strategis 4						100
5	Penguatan Ketatalaksanaan, kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja	42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100
		43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%	100
		44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	95%	95%	100
		45	Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100
		46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100
		47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	85%	0%	0
		48	Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Strategis						85,71

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		2016		
				Target	Realisasi	%
6	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana	49	Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	10 Bagian	100
		50	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	17 Kegiatan	14 Kegiatan	82,35
Rata-rata Capaian Strategis 6						182,35

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

Hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

SASARAN 1 : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan					
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN	
2.1.1.	Jumlah RT	1.671	1.677	100,36	
2.1.2	Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	
2.1.3	Persentase RT yang memiliki administrasi baik	300 RT	300 RT	100	

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.4.	Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48	70	145,83
2.1.5.	Persentase penduduk yang memiliki KTP	93%	88,22%	94,86
2.1.6.	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	77.50%	33,27%	42,92
2.1.7.	Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	100%	100%	100
2.1.8.	Angka kemiskinan	2.35%	2.91%	76,00
2.1.9.	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	75%	55,47%	73,63
2.1.10.	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti	75%	0%	0
2.1.11.	Persentase permohonan hibah yang dapat ditindaklanjuti	90%	50%	55,55
2.1.12.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	68	68	100
2.1.13.	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL = 70% BTL = 30%	BL=59% BTL=40%	108,81
2.1.14.	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	85%	86,70%	102
2.1.15.	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 Buku	76 Buku	100
2.1.16.	Persentase penyelesaian pertanahan	25 Rapat 4 Rakor	25 rapat	100
2.1.17.	Nilai investasi	10 T	24,59 T	245,90
2.1.18.	Angka inflasi dan PDRB	6%	4.13%	68.83
2.1.19.	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5%	1,56%	31,20
2.1.20.	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas			
	a. Jumlah angkutan	3150	2525	80.16
	b. Jumlah pasar tradisional	19	21	110.53
	c. Jumlah rumah sakit	13	12	92.31
	d. Jumlah hotel	74	75	101.35

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
	e. Jumlah restoran	480	381	79.38
	f. Jumlah toko /supermarket	650	683	105.08
	g. Jumlah bank	180	185	102.78
	h. Ketersediaan listrik	450000	556.692 kVA	123.71
2.1.21.	Penganekaragaman pangan	0	0	0
2.1.22.	Persentase realisasi anggaran	96%	88,33%	92.01
2.1.23.	Persentase administrasi batas wilayah	39 Pilar	0 Pilar	0
2.1.24.	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16 Kegiatan	5 Kegiatan	31.25
2.1.25.	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1400 IMTN	3622 IMTN	258.71
2.1.26.	Angka kriminalitas	2.384 kejadian	2.208 Kejadian	92,62
2.1.27.	Cakupan penanganan bencana	17	431	172,40

Analisa untuk indikator yang mendukung Sasaran 1 yaitu Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat diterangkan sebagai berikut :

2.1.1.1. Jumlah RT

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk maka perlu adanya peningkatan pelayanan kepada warga. Seiring dengan pemekaran Kelurahan di Kota Balikpapan, maka jumlah RT pun meningkat. Setelah dilakukan penghitungan diperoleh realisasi capaian kinerja sebanyak 100,36%. Adapun jumlah RT yang terdata pada tahun 2016, dengan rincian masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH RT
1	Kecamatan Balikpapan Utara	365
2	Kecamatan Balikpapan Barat	265
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	327
4	Kecamatan Balikpapan Selatan	319
5	Kecamatan Balikpapan Timur	174
6	Kecamatan Balikpapan Kota	227
TOTAL		1.677

2.1.2 Presentase Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota

Penilaian kelurahan berprestasi tingkat kotabertujuan untuk menyiapkan perwakilan Kota Balikpapan dalam mengikuti Lomba Kelurahan hingga ke tingkat nasional. Pada tahun 2016 Kelurahan yang berprestasi di Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Kepala BPMPPKB Kota Balikpapan Nomor : 188.46/052/BPMPPKB/2016 tanggal 20 April 2016 adalah sebanyak 6 (enam) Kelurahan dari Kecamatan se-Kota Balikpapan. Adapun Kelurahan dengan prestasi terbaik di Kota Balikpapan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Batu ampar	1
2	Lamaru	2
3	Baru Tengah	3
4	Prapatan	4
5	Damai Bahagia	5
6	Gunung Sari Ulu	6

2.1.3. Presentase RT yang memiliki administrasi baik

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk secara swadaya yang bertujuan membantu Pemerintah dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk menunjang hal tersebut Ketua RT dibekali pula dengan pengetahuan tentang tertib administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi umum lainnya. Pembinaan atau sosialisasi tertib administrasi secara rutin diberikan kepada para Ketua RT yang berada di masing-masing Kecamatan. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembagian Buku Administrasi RT kepada 300 RT yang ada di Balikpapan dengan tujuan agar RT yang ada di Balikpapan menjadi tertib dalam mengelola administrasinya. Target Persentase RT yang memiliki administrasi baik di Kota Balikpapan tercapai sebanyak 100%.

2.1.4. Persentase Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional)

Capaian jumlah prestasi yang diterima oleh Kota Balikpapan mencapai target 145,835. Hal ini dikarenakan perolehan penghargaan bagi Kota Balikpapan baik di

tingkat Propinsi maupun nasional dan internasional meraih sebanyak 70 penghargaan atau melebihi target yang telah diharapkan yaitu 48 penghargaan

2.1.5. Presentase penduduk yang memiliki KTP

Pada tahun 2016 presentase penduduk yang memiliki KTP di Kota Balikpapan mencapai 88,22 %, hal ini berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki e-KTP yang sudah dicetak dan didistribusi ke wajib KTP, sedangkan untuk wajib KTP yang belum memiliki e-KTP dikarenakan blanko e-KTP yang terbatas sehingga warga belum sepenuhnya memiliki e-KTP dan digantikan dengan Surat Keterangan saja.

2.1.6. Presentase penduduk yang memiliki akta Kelahiran

Salah satu faktor pengukur penduduk yang memiliki akta kelahiran adalah asas domisili tempat tinggal bukan asas tempat kelahiran, presentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Balikpapan hanya mencapai 33,27 % dari target. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat yang melaksanakan persalinan/kelahiran di Balikpapan berasal dari luar Balikpapan dan mengurus akta kelahiran di luar Kota Balikpapan.

2.1.7. Persentase SKPD yang Telah Melaksanakan IKM

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan PerMenPAN RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.3-101.1/Org/2016 tanggal 07 April 2016 tentang Tim Penyusunan Metodologi dan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016.

Survei IKM Tahun 2016 dilaksanakan pada SKPD dan unit kerja penyelenggara pelayanan, telah melampaui target tahun 2016 atau capaian kinerja sebesar 100%, yaitu 180 SKPD dan Unit Kerja Penyelenggara pelayanan, yang terdiri dari :

- a. SKPD : 11
- b. Kecamatan : 6
- c. Kelurahan : 34
- d. Puskesmas : 28
- e. SD : 64
- f. SMP : 22

- g. SMA : 9
h. SMK : 6

2.1.8. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Balikpapan mengalami kenaikan, dari target 2,35% menjadi 2,91%. Tingginya angka kemiskinan dikarenakan kondisi ekonomi saat ini dimana dunia usaha banyak yang tutup dan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Untuk membantu mengurangi dampak dari kondisi ekonomi para warga miskin berhak untuk mendapatkan beras bersubsidi atau sering disebut Raskin. Adapun data penerima manfaat program Raskin adalah sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA RASKIN
1	Balikpapan Utara	2290
2	Balikpapan Tengah	1476
3	Balikpapan Selatan	2462
4	Balikpapan Kota	975
5	Balikpapan Barat	2093
6	Balikpapan Timur	1329

2.1.9. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Melalui LPSE

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa/Proyek yang dilelang melalui LPSE pada tahun 2016 dan selesai paket pekerjaannya adalah sebanyak 299 Paket dari 306 Paket lelang yang masuk, dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan dimana Pagu lelang tahun 2015 Rp. 528.626.744.832 dan Pagu lelang tahun 2016 adalah Rp. 373.954.673.077. Persentase capaian kinerja untuk tahun 2016 tidak mencapai target atau hanya 73,63% dikarenakan defisit anggaran sehingga banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibatalkan

2.1.10. Persentase Permohonan Bansos Yang Dapat Ditindak lanjuti

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan pada Pasal 4 (butir 2 dan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengelola hibah bidang

keagamaan antara lain rumah ibadah dan organisasi keagamaan serta bidang tugas lain yang sejenis dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Untuk Tahun 2016, capaian kinerja pemberian Bantuan Sosial terencana adalah 0%. Walaupun dalam kenyataannya, untuk Bantuan Sosial tidak terencana tetap teralisasi sebesar Rp. 433.222.400 yaitu bantuan sosial tidak terencana untuk Organisasi sosial kemasyarakatan bidang pendidikan. Bantuan Sosial tidak terencana tersebut diperuntukan bagi individu dan atau keluarga yang mengalami bencana alam dan resiko sosial, sehingga alokasi penggunaan dana tersebut bersifat insidental.

2.1.11. Persentase Permohonan Hibah Yang Dapat Ditindaklanjuti

Perbandingan dengan realisasi belanja hibah yang dapat ditindaklanjuti sebesar 50% dikarenakan jumlah permohonan pencairan dana hibah tidak sepenuhnya di realisasikan oleh calon penerima hibah yang telah di tetapkan sebelumnya oleh Wali Kota pada anggaran belanja hibah APBD Tahun 2016. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak lengkapnya dokumen persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, terjadi konflik internal pada lembaga/organisasi calon penerima hibah atau dikarenakan Penyerahan berkas permohonan hibah tersebut telah melewati batas waktu permohonan realisasi dana hibah Pemerintah Kota.

Dalam pelaksanaan belanja langsung DPA Bagian Kesra Tahun Anggaran 2016 selain pelaksanaan kegiatan prioritas dan kegiatan tahunan, terdapat pula kegiatan operasional lembaga keagamaan dan kemasyarakatan serta beasiswa stimulant pendidikan tinggi.

Data Hibah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	KATEGORI PENERIMA BANTUAN	JUMLAH	JUMLAH RUPIAH
1	Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan	1	1.493.738.150
2	Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	129	5.425.545.000

2.1.12. Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Sistem Informasi Manajemen/Aplikasi

SIM atau aplikasi yang telah diterapkan pada tahun 2016 adalah penggunaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Penyerapan Realisasi Anggaran (SIMONTEPRA) dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dimana seluruh SKPD telah diwajibkan untuk melakukan pelaporan bulanan penyerapan fisik dan anggaran menggunakan aplikasi SIMONTEPRA sementara untuk Rencana Umum Pengadaan dari seluruh kegiatan di SKPD wajib diumumkan terlebih dahulu di aplikasi SiRUP. Selain itu, setiap SKPD telah siap melaksanakan E-Government dikarenakan jaringan internet telah ada di setiap SKPD sehingga proses penyampaian informasi serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat. Target SKPD yang menggunakan aplikasi atau menerapkan Sistem Informasi Manajemen adalah 68 SKPD atau mencapai capaian kinerja 100%.

2.1.13. Persentase proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Target Belanja Langsung (BL) adalah 70% dan Realisasi BL adalah 59% dan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) = 30% dan Realisasi BTL sebesar 40%. Tingginya BTL dikarenakan adanya peningkatan penyerapan anggaran khususnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Bansos dan hibah.

2.1.14. Persentase penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa

Penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa Kota Balikpapan untuk tahun 2016 adalah 86,70%. Pencapaian kinerja mencapai 102%.

2.1.15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan

Dokumen laporan kegiatan dalam hal ini adalah laporan bulanan tentang pencapaian fisik dan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan, terpenuhi sebanyak 76 buku atau capaian kinerja 100%

2.1.16. Persentase penyelesaian pertanahan

Rapat pelaksanaan penyelesaian pertanahan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 25 kali rapat atau capaian kinerja 100%.

2.1.17. Nilai investasi

Untuk investasi juga mengalami kenaikan, dari target nilai investasi sebesar Rp. 10 Trilyun dapat terealisasi sebesar Rp. 24.598.067.653.097, 00 atau capaian kinerja naik 245,90%. Penyumbang terbesar nilai investasi adalah bidang prasarana wilayah dan bidang industri.

2.1.18. Angka inflasi

Tingkat inflasi mencapai angka 4,13% dari target 6%. Terkendalnya inflasi dikarenakan terkoordinasi dengan baiknya Tim Pengendali Inflasi Daerah dan kerjasama seluruh komponen masyarakat yang mendukung program-program pengendali Inflasi. Salah satunya Program Pengendalian Inflasi dari Bank Indonesia.

2.1.19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi

Angka laju pertumbuhan ekonomi di kota Balikpapan saat ini berdasar data BPS berada di kisaran 1,56%. Sementara itu data PDRB per kapita di Kota Balikpapan adalah Rp. 121.725.093,00 dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 70,97 Trilyun. Pemerintah Kota Balikpapan meletakkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada level 1,56%, hal tersebut didasari oleh asumsi pertumbuhan Nasional yang berkisar 4,9 s/d 5,2% serta asumsi pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Timur sebesar -0,6 s/d -03 yang artinya pertumbuhan ekonomi Propinsi Kaltim pada tahun 2016 masih mengalami kontraksi hal tersebut dipengaruhi oleh dampak penurunan komoditas sektor pertambangan yang merupakan motor penggerak utama ekonomi Kalimantan Timur.

2.1.20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas

Terdiri dari 8 kegiatan yaitu Angkutan, Pasar tradisional, Rumah sakit, Hotel, Restoran, Toko/supermarket dan Bank capaian kinerja rata-rata dari peningkatan prasarana, sarana dan utilitas untuk tahun 2016 adalah 99,41%.

2.1.21. Penganekaragaman pangan

Di tahun 2016 belum ada kegiatan Penganeka ragam jenis pangan atau sering disebut juga dengan Diversifikasi Pangan yang merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan agar masyarakat Indonesia tidak monoton sebagai konsumen

beras, atau menjadikan beras sebagai konsumsi utama. Di Kota Balikpapan penduduk masih menjadikan beras sebagai bahan konsumsi utama. Capaian kinerja untuk indikator Penganekaragaman Pangan adalah 0%.

2.1.22. Persentase realisasi anggaran

Besarnya persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota pada tahun 2016 adalah 88,33%. Serapan anggaran di tahun 2016 lebih kecil dari pada target yang di tetapkan, selain karena terjadinya rasionalisasi anggaran dikarenakan juga adanya efisiensi yang dilakukan oleh masing – masing bagian. Capaian kinerja adalah mencapai 92,01%.

Realisasi Anggaran untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	JUMLAH ANGGARAN 2016 SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN 2016 SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	%
1.	Rp 336,340,520,010	Rp 270,164,519,874	Rp 238,638,879,340	88.33

2.1.23. Persentase administrasi batas wilayah

Dalam indikator persentase administrasi batas wilayah untuk Tahun 2016, memperoleh capaian kinerja 0%. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan dari Program yang mendukung pembuatan pilar batas wilayah harus tertunda.

2.1.24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan, pada tahun 2016 terlaksana sebanyak 5 kegiatan operasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan. Capaian kinerja 31,25%. Kegiatan operasi meliputi Posko Siaga Pelayanan Masyarakat dan Operasi Tempat Hiburan Malam.

2.1.25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara

Tingginya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kepemilikan tanah dan bangunan, mendorong peningkatan jumlah pengurusan IMTN. Untuk tahun 2016 jumlah IMTN yang dikeluarkan adalah sebanyak 3.622 IMTN atau mencakup capaian kinerja sebesar 258,71%.

2.1.26. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas pada tahun 2016 sebesar 2.208 kejadian dan dari semua laporan tindak kriminalitas ditangani seluruhnya. Capaian kinerja adalah 92,62%.

2.1.27. Cakupan penanganan bencana

Penangan bencana di Kota Balikpapan sebesar 100 %, hal ini dari target kejadian yang diprediksi awal tahun 2016 sebesar 250 kejadian dan laporan akhir tahun menunjukkan penanganan kejadian bencana sebesar 431 kejadian baik bencana alam maupun kebakaran yang juga berdampak dari faktor perubahan cuaca antara musim kemarau dan cuaca ekstrim. Cakupan kinerja mencapai 172,40%.

Analisa untuk indikator yang mendukung Sasaran 2 yaitu Penataan Perundang-undangan, dapat diterangkan sebagai berikut :

SASARAN 2 : PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN					
NO	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.28	Persentase Peraturan Daerah	penerbitan	100%	100%	100
2.1.29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya		68 Kegiatan	34 Kegiatan	50
2.1.30	Jumlah :				
	1. Perda		10	11	110
	2. Perwal		40	60	150
	3. Keputusan		400	510	127.5
2.1.31	Persentase keluarga sadar hukum		10 Kelurahan	0 Kelurahan	0
2.1.32	Persentase perkara hukum	penanganan	100%	100%	100

2.1.28. Persentase Penerbitan Peraturan Daerah

Capaian kinerja peraturan Daerah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, dimana dari seluruh Perda yang diusulkan dapat diterbitkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Realisasi Perda untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

REALISASI PERDA TAHUN 2016	
1.	Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2.	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
4.	Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
5.	Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Permakaman
6.	Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan
7.	Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026
8.	Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sanitasi
9.	Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
10.	Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
11.	Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

2.1.29. Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Perda dan Produk hukum lainnya

Indikator Sosialisasi dan Diseminasi Perda dan Produk hukum hanya mencapai angka 50%. Dikarenakan rasionalisasi anggaran Tahun 2016, dimana kegiatan sosialisasi dikurangi, walau demikian masyarakat tetap dapat mengetahui perkembangan Perda atau produk hukum lainnya di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Balikpapan dengan alamat : <http://jdih.balikpapan.go.id> atau datang langsung ke Bagian hukum Setda Kota Balikpapan untuk mendapatkan informasi perihal Produk hukum daerah yang diterbitkan di Kota Balikpapan.

2.1.30. Jumlah Perda/Perwal/Keputusan

Kinerja penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota cukup tinggi untuk tahun 2016. Capaian Kinerja Penerbitan Perda adalah 110%, capaian kinerja penerbitan Perwal adalah 150% dan capaian kinerja penerbitan Keputusan adalah 127,5%. Penerbitan Peraturan Walikota terbanyak adalah peraturan bidang kelembagaan, yaitu penetapan Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah.

2.1.31. Persentase Keluarga Sadar Hukum

Keluarga Sadar Hukum dibentuk dengan tujuan sebagai motivator di Kelurahan untuk menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya memahami aturan-aturan hukum. Pada tahun 2016 telah direncanakan untuk melaksanakan Sosialisasi Hukum kepada Kelompok-kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan-Kelurahan, namun mengingat rasionalisasi anggaran maka untuk tahun 2016 segala bentuk kegiatan pembinaan ditiadakan namun demikian Kelurahan-Kelurahan tetap disarankan untuk melakukan pembinaan Kelompok Kadarkum di wilayahnya.

2.1.32. Persentase penanganan perkara hukum

Pada proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum, dari target 100% di tahun 2016 telah terealisasi sebesar 100%, dimana seluruh perkara yang melibatkan Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum baik dalam bentuk kuasa maupun pendampingan pada saat proses penyelesaian perkara.

Analisa untuk Sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya hubungan Kerja", dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN 3 : MENINGKATNYA HUBUNGAN KERJA				
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.33	Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	100
2.1.34	Jumlah rapat MUSPIDA	-	-	0
2.1.35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	80 kunker	80 Kunker	100
2.1.36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	350	663	189
2.1.37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100
2.1.38	Jumlah jumpa pers	25	19	76
2.1.39	Jumlah talk show	18	6	33.33
2.1.40	Jumlah kerjasama	6 Kegiatan	6 kegiatan	100

2.1.33. Jumlah Coffe Morning

Untuk Indikator Jumlah Coffe Morning tercapai sebesar 100% karena kegiatan Coffe Morning selalu rutin dilaksanakan setiap minggunya

2.1.34. Jumlah rapat MUSPIDA

Tidak ada pelaksanaan kegiatan MUSPIDA pada tahun 2016

2.1.35. Jumlah Kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan

Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 adalah sebanyak 80 Kunjungan dengan menerima tamu sebanyak 1.539 Orang. Rincian unsur tamu Kunjungan Kerja yang datang ke Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR TAMU KUNKER	JUMLAH KUNKER	JUMLAH TAMU
1	DPR RI	0	0
2	DPRD Provinsi	3	47
3	DPRD Kabupaten	42	766
4	DPRD Kota	8	98
5	Pemerintah Provinsi	4	126
6	Pemerintah Kabupaten	8	182
7	Pemerintah Kota	13	320
8	Kementrian	1	8
9	Universitas	1	30
Jumlah		80	1577

2.1.36. Jumlah kegiatan Kepala Daerah

Capaian kinerja Jumlah kegiatan Kepala Daerah adalah 189%. Kegiatan Kepala Daerah pada tahun 2016 meningkat seiring banyaknya kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Balikpapan dan kegiatan kedinasan di luar jam kerja khususnya untuk acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat.

2.1.37. Persentase tindaklanjut hasil coffe morning

Hasil Coffe Morning senantiasa dituangkan dalam Notulen Rapat dan selanjutnya diteruskan ke seluruh SKPD untuk ditindaklanjuti. Capaian Indikator hasil coffe morning adalah 100%.

2.1.38. Jumlah Jumpa Pers

Capaian indikator Jumlah Jumpa Pers adalah 76%, terbatasnya kegiatan Jumpa Pers adalah salah satu upaya melakukan efisiensi anggaran akibat imbas defisit anggaran.

2.1.39. Jumlah Talkshow

Capaian Indikator Jumlah Talkshow hanya mencapai 33,33%. Kegiatan Talkshow juga dikurangi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2016.

2.1.40. Jumlah Kerjasama

Jumlah Kerjasama mencapai 100% capaian kinerja. Karena dari target 6 kegiatan setahun dapat terealisasi seluruhnya

Analisa Sasaran keempat yaitu "Meningkatnya Profesionalisme Dan Kesejahteraan Aparatur", dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PROFESSIONALISME DAN KESEJAHTERAAN APARATUR				
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal	1 draft perwal	100

2.1.41. Jumlah Kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur

Untuk Indikator Jumlah Kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur tidak tercapai atau 100 % dikarenakan konsep Peraturan Walikota terbaru terkait bidang aparatur yaitu konsep Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kerja telah selesai diproses walaupun belum dapat disahkan hingga akhir tahun 2016.

Analisa Sasaran kelima yaitu "Penguatan Ketatalaksanaan, Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja", dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN 5 : PENGUATAN KETATALAKSANAAN, KELEMBAGAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA				
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100
2.1.43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%	100
2.1.44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	95%	95%	100

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.45	Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100
2.1.46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100
2.1.47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	85%	0%	0
2.1.48	Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%	100

2.1.42. Persentase Jumlah Dokumen AKIP SKPD

Sebagai bentuk transparansi SKPD dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bertanggungjawab, maka seluruh SKPD diwajibkan untuk menyusun Dokumen AKIP atau saat ini disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator kinerja Jumlah Dokumen AKIP SKPD adalah 100%, karena seluruh SKPD telah mengumpulkan Laporan Kinerjanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dari setiap SKPD

2.1.43. Persentase SKPD menyampaikan LAKIP tepat waktu

Untuk Capaian kinerja Persentase SKPD menyampaikan Laporan Kinerja (LKj-IP) tepat waktu juga mencapai 100%, karena pada sebelum batas waktu yang telah ditentukan, SKPD telah mampu menyelesaikan Laporan Kinerja masing-masing

2.1.44. Persentase SKPD menyampaikan laporan bulanan tepat waktu

Pelaporan realisasi fisik dan keuangan saat ini telah menggunakan aplikasi SIMONTEPRA, sehingga bisa dipastikan bahwa laporan bulanan harus dilaksanakan tepat pada waktunya, walaupun demikian masih terdapat SKPD yang kadang kala terlambat melakukan input pelaporan melalui Simonteptra atau melewati jadwal pelaporan yang telah ditetapkan.

2.1.45. Persentase SKPD yang memiliki SOP

SOP adalah standar prosedur yang dijadikan acuan dari tiap SKPD dalam melaksanakan kegiatannya. Capaian indikator Persentase SKPD yang memiliki SOP adalah 100%

2.1.46. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan

Capaian persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan adalah 100%. Uraian Jabatan adalah panduan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Uraian Jabatan telah dimiliki oleh seluruh SKPD dan telah dipahami oleh pejabat yang terkait

2.1.47. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP

Pada penilaian LKjIP tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan, dilakukan penilaian kepada 19 SKPD dan memperoleh hasil sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	NILAI (%)	KATEGORI
1	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	69,98	B
2	Badan Kepegawaian Daerah	69,06	B
3	Badan Penanaman Modal dan Pengelola Perizinan Terpadu	68,58	B
4	Dinas Pendidikan	67,51	B
5	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	65,82	B
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	64,51	B
7	Dinas Tata Kota dan Permukiman	59,86	CC
8	Dinas Pendapatan Daerah	59,74	CC
9	Inspektorat Kota Balikpapan	58,40	CC
10	Badan Lingkungan Hidup	58,11	CC
11	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	55,34	CC
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	53,64	CC
13	Kantor Arsip Perpustakaan	53,53	CC
14	Kecamatan Balikpapan Selatan	51,89	CC
15	Kecamatan Balikpapan Utara	51,70	CC
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	51,36	CC
17	Satuan Polisi Pamong Praja	50,56	CC
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	50,32	CC
19	Dinas Perhubungan	50,28	CC

Sumber : LKjIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016

Mengingat tidak ada SKPD yang meraih nilai dengan kategori BB atau Sangat Baik, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP adalah 0%. Pembinaan dan pendampingan kepada SKPD tetap senantiasa dilakukan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan kualitas penyajian Laporan Kinerja dari setiap SKPD.

2.1.48. Persentase PPID Pembantu di SKPD

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dibentuk di seluruh SKPD, Peran dan tugas fungsinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik telah dilaksanakan di masing-masing SKPD. Capaian kinerja indikator Persentase PPID Pembantu di SKPD 100%.

Analisa Sasaran kelima yaitu "Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana", dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN 6 : MENINGKATNYA SISTEM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA				
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
2.1.49.	Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	10 Bagian	100
2.1.50.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	17 Kegiatan	14 Kegiatan	82,35

2.1.49. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang

Kebutuhan Barang untuk tiap unsur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, telah terpenuhi dengan baik dimana setiap usulan yang ada segera ditindaklanjuti. Dari 10 Bagian yang ada, seluruh Bagian terlayani dengan baik. Capaian Kinerja tersedianya rencana kebutuhan barang adalah 100%

2.1.50. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

Pada tahun 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pemenuhan sarana dan prasarana. Kegiatan yang ada meliputi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta meterisasi penerangan jalan umum. Capaian kinerja untuk indikator Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi adalah 82,35%.

2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Untuk mengetahui perkembangan yang telah diraih, maka selanjutnya membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 1 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.1.	Jumlah RT	RT	1.671	1.671	100	1.671	1.677	100,36
2.2.2.	Persentase Kelurahan berprestasi Kota Tk.	Kelurahan	6	6	100	6	6	100
2.2.3.	Persentase RT yang memiliki administrasi baik	RT	33	33	100	300	300	100
2.2.4.	Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	Buah	48	48	100	48	70	145,83
2.2.5.	Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	100	94,38	94	93	88,22	94,86
2.2.6.	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	%	80,50	80,13	100	77,50	33,27	42,92
2.2.7.	Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	%	100	100	100	100	100	100
2.2.8.	Angka kemiskinan		3,79	2,38	137,2	2,35	2,91	76,00

2.2.9.	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	75	22	53	75	55,47	73,63
2.2.10.	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti	%	78	0,99	1,27	75	0	0
2.2.11.	Persentase permohonan hibah yang dapat ditindaklanjuti	%	95	84,70	89	90	50	55,56
2.2.12.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	SKPD	67	67	100	68	68	100
2.2.13.	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	%	BL=70 BTL=30	BL : 69 BTL :31	100	BL = 70 BTL=30	BL = 59 BTL = 40	108,81
2.2.14.	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	%	85	83	95	85	86,70%	102
2.2.15.	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	Buku	76	76	100	76	76	100
2.2.16.	Persentase penyelesaian pertanahan	Rapat	35 rapat 4 rakor	25 rapat, 4 rakor	65	25	25	100
2.2.17.	Nilai investasi	T	5	18,87	377	10	24,59	245,90
2.2.18.	Angka inflasi dan PDRB	%	5	7,90	2	6	4.13	68,83
2.2.19.	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7	3.98	1	5	1,56	31,20
2.2.20.	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas			8 Kegiatan				
	a. Jumlah angkutan	Unit	2190	3.116	142	3150	2525	80.16
	b. Jumlah pasar tradisional	Unit	18	18	100	19	21	110.53
	c. Jumlah rumah sakit	Unit	13	13	100	13	12	92.31
	d. Jumlah hotel	Unit	73	74	101	74	75	101.35
	e. Jumlah restoran	Unit	424	473	112	480	381	79.38
	f. Jumlah toko/supermarket	Unit	25	621	621	650	683	105.08
	g. Jumlah bank	Unit	176	176	2484	180	185	102.78
	h. Ketersediaan listrik	KV	395.000	448,714	114	450000	556.692 kVA	123.71
2.2.21.	Penganekaragaman pangan		1	0	0	0	0	0
2.2.22.	Persentase realisasi anggaran	%	96	93,56	97,45	96	88,33	92.01

2.2.23.	Persentase administrasi batas wilayah	Pilar	PBU : 15, PBA : 44	PBU : 15, PBA : 16	90	39	0 Pilar	0
2.2.24.	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	Kegiatan	17	16	94	16	5	31.25
2.2.25.	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	IMTN	5.163	3.763	83	1400	3622	258.71
2.2.26.	Angka kriminalitas	Kejadian	2.637	2.384	90	2.384	2.208	92,62
2.2.27.	Cakupan penanganan bencana	Kejadian	70	394	563	18	431	172,40

Pada tahun 2015, Pencapaian kinerja sasaran strategis 1 adalah 103,6 % sedangkan untuk tahun 2016 mencapai 118,09%, tetap mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Sangat tinggi

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 2 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.28	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	%	80	87	108	100	100	100
2.2.29	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	Kegiatan	68	68	100	68	34	50
2.2.30	Jumlah :							
	1. Perda		15	13	86	10	11	110
	2. Perwal		25	44	176	40	60	150
	3. Keputusan		300	520	173	400	510	127,5
2.2.31	Persentase keluarga sadar hukum	Kelurahan	100	100	100	10	10	100
2.2.32	Persentase penanganan perkara hukum	%	90	100	112	100	100	150

Capaian kinerja Sasaran 2 Pada tahun 2015 adalah 122 % sedangkan untuk tahun 2016 mencapai 104%, tetap mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Sangat tinggi

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 3 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.33	Jumlah <i>coffee morning</i>	Kali	52	52	100	52	52	100
2.2.34	Jumlah rapat MUSPIDA	Kali	15	15	100	-	-	0
2.2.35	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	Kunker	45	111	247	80	78	97,50
2.2.36	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	Kali	236	226	95,76	350	663	189
2.2.37	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	%	100	100%	100	100%	100%	100
2.2.38	Jumlah jumpa pers	Kali	25	25	100	25	19	76
2.2.39	Jumlah talk show	Kali	12	18	150	18	6	33,33
2.2.40	Jumlah kerjasama	Kegiatan	6	6	100	6	6	100

Capaian kinerja Sasaran 3 Pada tahun 2015 adalah 124,6 % sedangkan untuk tahun 2016 mencapai 70,63%, atau mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Sedang.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 4 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	Draft Perwal	1 draft perwal	1 draft perwal	100	1 draft perwal	1 draft perwal	100

Capaian kinerja Sasaran 4 Pada tahun 2015 adalah 100 % dan untuk tahun 2016 mencapai tetap 100%, atau mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Sangat Tinggi.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 5 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.42	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	%	100	100	100	100	100	100
2.2.43	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
2.2.44	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	%	95	99,46	100	95	95	100
2.2.45	Persentase SKPD yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100	100
2.2.46	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	%	100	100	100	100	100	100
2.2.47	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	%	80	80	100	85	0	0
2.2.48	Persentase PPID Pembantu di SKPD	%	69	68	98,5	100	100	100

Capaian kinerja Sasaran 5 Pada tahun 2015 adalah 96,3 % dan untuk tahun 2016 mencapai 85,71%, atau mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Tinggi.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Sasaran 6 untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%
2.2.49	Tersedianya rencana kebutuhan barang	Bagian	10	10	100	10	10	100
2.2.50	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	Kegiatan	14	15	107	17	14	82,35

Capaian kinerja Sasaran 6 Pada tahun 2015 adalah 103,5 % dan untuk tahun 2016 mencapai 182,35%, atau mendapatkan capaian kinerja dengan kriteria Sangat Tinggi.

2.3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TARGET AKHIR RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah melalui tahun akhir dari periode Dokuem Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2011 – 2016.

Selanjutnya jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk sasaran 1 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.1.	Jumlah RT	RT	1.671	1.677	100
2.3.2.	Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	Kelurahan	6	6	100
2.3.3.	Persentase RT yang memiliki administrasi baik	RT	300	300	100
2.3.4.	Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	Buah	48	70	145,83

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.5.	Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	93	88,22	94,86
2.3.6.	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	%	77.50	33,27	42,92
2.3.7.	Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	%	100	100	100
2.3.8.	Angkakemiskinan	%	2.35	2.91	76,00
2.3.9.	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	75	55,47	73,63
2.3.10.	Persentase permohonan bansos yang dapat ditindaklanjuti	%	75	0	0
2.3.11.	Persentase permohonan hibah yang dapat ditindaklanjuti	%	90	50	55,55
2.3.12.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	SKPD	68	68	100
2.3.13.	Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	%	BL = 70 BTL = 30	BL= 59% BTL=40%	108,81
2.3.14.	Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	%	85	86,70	102
2.3.15.	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	Buku	76	76	100
2.3.16.	Persentase penyelesaian pertanahan	Rapat	25	25 rapat, 4 rakor	100
2.3.17.	Nilai investasi	T	10	24,59	245.90
2.3.18.	Angka inflasi dan PDRB	%	6	4.13	68.83
2.3.19.	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5	1,56	31,20
2.3.20.	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas				
	a. Jumlah angkutan	Unit	3150	2525	80.16
	b. Jumlah pasar tradisional	Unit	19	21	110.53
	c. Jumlah rumah sakit	Unit	13	12	92.31
	d. Jumlah hotel	Unit	74	75	101.35
	e. Jumlah restoran	Unit	480	381	79.38
	f. Jumlah toko/supermarket	Unit	650	683	105.08
	g. Jumlah bank	Unit	180	185	102.78
	h. Ketersediaan listrik	KV	450000	556.692 kVA	123.71
2.3.21.	Penganekaragaman pangan		0	0	0%
2.3.22.	Persentase realisasi anggaran	%	96	88,33	92.01
2.3.23.	Persentase administrasi batas wilayah	Pilar	39	0 Pilar	0
2.3.24.	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	Kegiatan	16	5	31.25

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.25.	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	IMTN	1400	3622	258.71
2.3.26.	Angka kriminalitas	Kejadian	2.384	2.208	92,62
2.3.27.	Cakupan penanganan bencana	Kejadian	19	431	172,40

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk Sasaran 2 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.28.	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	%	100	100	100
2.3.29.	Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	Kegiatan	68	34	50
2.3.30.	Jumlah :				
	1. Perda		10	11	110
	2. Perwal		40	60	150
	3. Keputusan		400	510	127.5
2.3.31.	Persentase keluarga sadar hukum	Kelurahan	10	0	0
2.3.32.	Persentase penanganan perkara hukum	%	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk Sasaran 3 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.33.	Jumlah <i>coffee morning</i>	Kali	52	52	100
2.3.34.	Jumlah rapat MUSPIDA	Kali	-	-	0
2.3.35.	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	Kunker	80 kunker	80 Kunker	100
2.3.36.	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	Kali	350	663	189
2.3.37.	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	%	100%	100%	100
2.3.38.	Jumlah jumpa pers	Kali	25	19	76
2.3.39.	Jumlah talk show	Kali	18	6	33.33
2.3.40.	Jumlah kerjasama	Kegiatan	6 Kegiatan	6 kegiatan	100

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk Sasaran 4 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.41	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	Draft Perwal	1 draft perwal	1 draft perwal	100

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk Sasaran 5 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.42.	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	%	100	100	100
2.3.43.	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	100	100	100
2.3.44.	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	%	95	95	100
2.3.45.	Persentase SKPD yang memiliki SOP	%	100	100	100
2.3.46.	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	%	100	100	100
2.3.47.	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	%	85	0	0
2.3.48.	Persentase PPID Pembantu di SKPD	%	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi untuk Sasaran 6 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2016	% Pencapaian
2.3.49.	Tersedianya rencana kebutuhan barang	Bagian	10	10	100
2.3.50.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	Kegiatan	17	14	82,35

3. ANALISA KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

3.1. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

- 3.1.1. Adanya pemekaran wilayah Kelurahan mendorong peningkatan jumlah RT di Kota Balikpapan
- 3.1.2. Pembinaan dan pembagian Buku Administrasi RT mendorong meningkatnya jumlah RT yang tertib administrasi
- 3.1.3. Kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat serta pembinaan dari Pimpinan mendorong peningkatan Jumlah prestasi dari Kota Balikpapan
- 3.1.4. Kesadaran masyarakat akan tertib administrasi pertanahan mendorong peningkatan pengurusan IMTN
- 3.1.5. Koordinasi yang cepat mengakibatkan penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik
- 3.1.6. Tingginya kebutuhan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengeluarkan regulasi teknis mendorong peningkatan jumlah Perda, Perwal dan Keputusan yang dikeluarkan.

3.2. Analisa penyebab kegagalan/penurunan kinerja

- 3.2.1. Krisis Ekonomi global, banyaknya perusahaan yang tutup dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan angka kemiskinan meningkat dan bahkan mendorong masih tingginya angka kriminalitas
- 3.2.2. Penerima dana hibah/bansos tidak menyampaikan SPJ penggunaan dana yang diterima secara tepat waktu
- 3.2.3. Belum optimalnya penerapan dan pengembangan SAKIP

3.2.4. Rasionalisasi anggaran menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan harus ditinjau kembali atau dihapuskan

3.3. Alternatif Solusi yang dilakukan

3.3.1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan secara berjenjang kepada seluruh Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

3.3.2. Penerapan sistem pelaporan menggunakan aplikasi untuk memudahkan dalam memantau perkembangan capaian fisik dan anggaran dari seluruh perangkat daerah

3.3.3. Penerapan aturan Efisiensi atas seluruh sumber daya yang ada dengan tetap berorientasi pada hasil yang maksimal

4. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Rasio Efisiensi
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan masyarakat	118,09	83,19	70,44
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	104	93,16	89,58
3.	Meningkatnya hubungan kerja	70,63	89,94	127,34
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	100	0	0
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	85,71	86,75	101,21
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	182,35	92,07	50,49
Rata-rata tingkat Efisiensi				73,18

Sesuai dengan Instruksi Wali Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan juga melakukan rasionalisasi program dan kegiatan melalui penghematan belanja APBD-P Tahun 2016.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Penggunaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan akan disajikan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016.

Target dan Realisasi Anggaran Belanja Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 270.164.519.874,00** dengan **realisasi sebesar Rp. 238.638.879.340,00** sehingga ada selisih lebih anggaran (silva) sebesar **Rp. 31.525.640.534,00**

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terinci sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

adalah belanja yang diperuntukan Belanja Pegawai, dalam bentuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan/atau Insentif.

2. Belanja Langsung,

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :

- 2.1. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 147.487.924.728,00 terealisasi Rp. 129.841.855.845,41 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 17.646.068.882.59 atau 11,96 %.
- 2.2. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 98.034.281.146,00 terealisasi sebesar Rp. 84.823.845.142,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 13.210.583.004,00 atau 13,48 %.

3. Besaran anggaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan masyarakat	Rp 18,326,884,411	Rp 15,247,070,017	83,19
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	Rp 1,529,885,420	Rp 1,425,197,120	93,16
3.	Meningkatnya hubungan kerja	Rp 1,693,401,950	Rp 1,507,812,488	89,94
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	0	0	0
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Rp 1,990,368,000	Rp 1,726,707,546	86,75
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	Rp 72,961,536,410	Rp 67,178,126,987	92,07

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2016 terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 50 (limapuluh) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 50 (limapuluh) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 27 indikator kinerja dengan realisasi capaian 118,09% atau kategori Sangat Tinggi

1.2. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 104 % dengan kategori Sangat Tinggi

1.3. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 70,63 %, dengan kategori Sedang

1.4. Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 100 %, dengan kategori Sangat Tinggi

1.5. Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5 terdiri dari 7 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 85,71% dengan kategori Tinggi

1.6. Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 182,35%, kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu dengan capaian kinerja 110,13% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi. Walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996, Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan diatur sebagai berikut :

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Dilihat dari tabel analisa atas efisiensi sumber daya di atas, secara keseluruhan dari semua sasaran strategis, rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja mencapai 73.18%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut, anggaran yang disediakan dipergunakan dengan Efisien. Diharapkan di tahun-tahun yang akan datang, efisiensi dalam penggunaan dana untuk mencapai sasaran dapat terus dipertahankan.

5. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 Program Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) Program, Capaian kinerja yang telah diraih dari setiap sasaran adalah merupakan kinerja dari Program di bawah ini:

No	Sasaran	Program Penunjang
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan 2. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 3. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 4. Program Penyusunan dan Evaluasi Anggaran 5. Program Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran

		<p>6. Program Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Fisik dan Administrasi Pamong Praja</p> <p>7. Program Pengembangan Sistem Pelaporan</p> <p>8. Program Fasilitasi Permasalahan Pertanahan</p> <p>9. Program Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah</p> <p>10. Program Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara</p> <p>11. Program Ketahanan Pangan</p> <p>12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	<p>14. Program Penataan perundang-undangan</p> <p>15. Program Bantuan Hukum</p>
3.	Meningkatnya hubungan kerja	<p>16. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</p> <p>17. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>18. Program Penyebarluasan Informasi Daerah</p> <p>19. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p>
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	<p>20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>21. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan</p> <p>22. Program Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan</p>
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	<p>23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>

2. SARAN

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan seperti yang disebutkan di atas maka strategi pemecahan masalahnya dalam upayanya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

- 2.1. Peningkatan koordinasi antar Bagian
 - 2.1.1. Semakin intensifnya rapat koordinasi antar bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan visi dan pemahaman dengan dikoordinasikan oleh Asisten.
 - 2.1.2. Adanya konsistensi yang bulat dan utuh dari kesatuan visi dan pemahaman yang telah disepakati bersama dengan implementasinya di lapangan.
- 2.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 2.2.1. Pendidikan dan pelatihan dengan metode dan kurikulum yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan beban kerja yang lebih kompleks.
 - 2.2.2. Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah.
- 2.3. Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi Sekretariat Daerah sebagai Organizing, staffing, coordinating, fasilitating, servicing, dan Advising dengan fungsi Dinas sebagai Designing, operating, actuating. Sehingga fungsi pelaksana teknis operasional pelayanan yang sifatnya langsung kepada masyarakat ditangani sepenuhnya oleh Dinas. Sementara Sekretariat Daerah hanya memberikan servis (pelayanannya) fokus kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah. Pemisahan fungsi secara tegas ini hanya dalam urusan pengelolaan suatu program kegiatan agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih kewenangan dan anggaran.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


SAYID MN FADLI

**PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1.671	1.677	100,36%	Penilaian lomba Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kota Balikpapan					Bagian Pemerintahan
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 kel	6 kel	100%	Pembinaan dan pemberian reward Lurah berprestasi 2013	Rp 120,045,000	Rp 104,411,600	86,98%		Bagian Pemerintahan
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	300	300	100%	Pengadaan buku Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT					Bagian Pemerintahan
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48	70	145.83%	-					Bagian Humaspro
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	93%	88,22%	94,86%	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Disdukcapil
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	77,50%	33,27%	42,92%	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Disdukcapil
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 290,125,000	Rp 257,925,000	88.90%		Bagian Organisasi
		8 Angka kemiskinan	2,35	2,91%	76,00%	Operasional Program Raskin					Bagian Perekonomian
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	75%	55,47%	73,63%	kelompok Kerja ULP	Rp 620,197,864.00	Rp 556,191,765.00	89.68		Bagian Pembangunan
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat tindak lanjuti	75%	0.00%	0%	Program Bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Anggota Masyarakat	Rp 1,000,000,000	Rp 433,222,400	43,32%		Bagian kesra
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat tindak lanjuti	90%	50.00%	55,56%	Program Pemberian hibah Pemerintah kota Balikpapan Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	Rp 8,741,420,000	Rp 6,919,283,150	79,16%		Bagian Kesra
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	68	68	100%	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 3,284,681,602	Rp 3,149,725,868	95.89%		Bagian Organisasi
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	BL= 70% , BTL = 30%	BL: 59 % , BTL: 40 %	108,81%	Pengendalian Kegiatan APBD	267,593,300	219,244,064	81.93		Bagian Pembangunan
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	85%	86,70%	102%	Operasional Simonteppa Kota Balikpapan	865,796,000	758,146,550	87.57		Bagian Pembangunan
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 Buku	76 Buku	100%	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	308,886,360	238,240,085	77.13		Bagian Pembangunan
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	25 rapat, 4 rakor	25 rapat	100%	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Rp 45,797,700	Rp 42,869,700	93,60%		Bagian KDAWP
		17 Nilai investasi	10T	24,59T	245,90%	-					Bagian Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18 Angka inflasi dan PDRB	6%	4,13%	68,83%	Program Ketahanan Pangan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Rp 121,278,460	Rp 130,678,460	108%	Bagian Perekonomian
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5%	1,56%	31,20%	-				Bagian Perekonomian
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas				-				Bagian Perekonomian
		a. Jumlah angkutan	3,150	2.525	80,16%	-				
		b. Jumlah pasar tradisional	19	21	110,53%	-				
		c. Jumlah rumah sakit	13	12	92,31%	-				
		d. Jumlah hotel	74	75	101,35%	-				
		E. Jumlah Restoran	480	381	79,58%	-				
		f. Jumlah Toko/ supermarket	650	683	105,08%	-				
		g. Jumlah Bank	180	185	102,78%	-				
		h. Ketersediaan Listrik	450,000	556,692	123,71%	-				
		21 Penganekaragaman pangan	-	0	0%	Diversifikasi Pangan				Bagian Perekonomian
		22 Persentase realisasi anggaran	96%	88,33%	92,01%	Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran Setdakot Balikpapan	Rp 97,290,000	Rp 96,565,000	99,25%	Bagian Keuangan
		23 Persentase administrasi batas wilayah	PBU 15 pilar, PBA 16 Pilar	0%	0%	Penataan Daerah Otonomi Baru				Bagian KDAWP
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16	5	31,25%	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 1,564,351,625	Rp 1,483,769,875	94,85%	Bagian Pemerintahan
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1,400	3,622	258,71%	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan izin Membuka/ Memanfaatkan tanah negara	Rp 999,421,500	Rp 856,796,500	85,72%	Bagian KDAWP
		26 Angka kriminalitas	2384	431	172,40%	-				Fungsional Polres
		27 Cakupan penanganan bencana	250	272	108,80%	Penanganan Kejadian Bencana dan kebakaran				Bagian Pemerintahan
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum	Rp 177,812,000	Rp 152,782,000	85,92%	Bagian Hukum
		29 Jumlah sosialisasi dan diseminasi Perda dan produk hukum lainnya	68 keg	34	50%	Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Kota Balikpapan	Rp 672,392,500	Rp 643,992,500	95,78%	
		30 Jumlah :								
		1. Perda	10	11	110%	Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Rp 411,998,300	Rp 374,515,400	90,90%	
		2. Perwal	40	60	150%					
		3. Keputusan	400	510	127,5%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31 Persentase keluarga sadar hukum	10 Kelurahan	0%	0%	Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Kota Balikpapan	Rp -	Rp -	0%	
		32 Persentase penyelesaian perkara hukum	100%	100%	100%	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum	Rp 267,682,620	Rp 253,907,220	94.85%	Bagian Hukum
3	Meningkatnya hubungan kerja	33 Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	100%	-				Bagian Humaspro
		34 Jumlah rapat MUSPIDA	15 kali	0	0%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp -	Rp -	0%	Bagian Umper
		35 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	80 Kunjungan	80 kunjungan	100%	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp 245,160,650	Rp 224,378,860	91,52%	Bagian Pemerintahan
		36 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	350	663	189.00%	Pelaksanaan acara kedinasan dan penerimaan tamu pemerintah kota Balikpapan di luar jam kerja	Rp 40,500,000	Rp 40,500,000	100%	Bagian Humaspro
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp 547,735,000	Rp 486,599,945	88,84%	Bagian Humaspro
		37 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%	100%	-				Bagian Humaspro
		38 Jumlah jumpa pers	25	19	76%	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 108,000,000	Rp 108,000,000	100%	Bagian Humaspro
		39 Jumlah talk show	18	6	33,33%	Kerjasama informasi dan media massa	Rp 90,000,000	Rp 24,000,000	26,67%	Bagian Humaspro
		40 Jumlah kerjasama	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	3 program Kegiatan	Rp 662,006,300	Rp 624,333,683	94,30%	Bagian KDAWP
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	41 Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal	1 draft perwal	100%	-				Bagian Organisasi
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	42 Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 223,125,000	Rp 208,532,420	93.46%	Bagian Organisasi
		43 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%	100%					Bagian Organisasi
		44 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	95%	95%	100%	Pengembangan sistem evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	865,796,000	758,146,550	87.57	Bagian Pembangunan
		45 Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 178,093,000	Rp 139,679,200	78.43%	Bagian Organisasi
		46 Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%	100%	100%	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp 192,441,000	Rp 158,114,250	82.16%	Bagian Organisasi
						Program Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Rp 360,413,000	Rp 308,880,126	85.70%	Bagian Organisasi
		47 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	85%	0%	0%	-				Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		48 Persentase PPID Pembantu di SKPD	100	100	100%	Pengelolaan dan peningkatan SDM bidang Kominfo	Rp 170,500,000	Rp 153,355,000	89,94%	Bagian Humaspro
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	49 Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian	10 Bagian	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 72,961,536,410	Rp 67,178,126,987	92,07%	Bagian Umper
		50 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	17 kegiatan	17 kegiatan	182,35%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Bagian Umper

Balikpapan, Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN FADLI
Pembina Utama Madya
NIP.19620509 198701 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYID MN FADLI**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 15 Januari 2016
Pihak Pertama

SAYID MN FADLI

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1,671
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	6 Kelurahan
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	300 RT
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	48
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	93%
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	77,50%
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM (SKPD Pelayanan)	100%
		8 Angka kemiskinan	2,35%
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	75%
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	75%
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	68
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL = 70% BTL = 30%
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	85%
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	76 Buku
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	25 Rapat
		17 Nilai investasi	10 T
		18 Angka inflasi dan PDRB	6%
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5%
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	
		a. Jumlah angkutan	3150
		b. Jumlah pasar tradisional	19
		c. Jumlah rumah sakit	13
		d. Jumlah hotel	74
		e. Jumlah restoran	480
		f. Jumlah toko/supermarket	650
		g. Jumlah bank	180
		h. Ketersediaan listrik	450000
		21 Penganekaragaman pangan	0
		22 Persentase realisasi anggaran	96%
		23 Persentase administrasi batas wilayah	39 Pilar
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	16 Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	1400 IMTN
		26 Angka kriminalitas	2.384 kejadian
		27 Cakupan penanganan bencana	250 kejadian
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	28 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%
		29 Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	68 Kegiatan
		30 Jumlah : 1. Perda 2. Perwal 3. Keputusan	10 40 400
		31 Persentase keluarga sadar hukum	10 Kelurahan
		32 Persentase penanganan perkara hukum	100%
3	Meningkatnya hubungan kerja	33 Jumlah <i>coffee morning</i>	52
		34 Jumlah rapat MUSPIDA	-
		35 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	80 kunker
		36 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	350
		37 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%
		38 Jumlah jumpa pers	25
		39 Jumlah talk show	18
		40 Jumlah kerjasama	6 Kegiatan
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	41 Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1 draft perwal
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	42 Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%
		43 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%
		44 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	95%
		45 Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%
		46 Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	100%
		47 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP	85%
		48 Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	49 Tersedianya rencana kebutuhan barang	10 Bagian
		50 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	17 Kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan/ kelurahan	Rp 450.000.000,00	
2. Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp 3.462.545.000,00	
3. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Rp 366.420.500,00	

4. Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp	18.357.900.000,00
5. Penyebarluasan Informasi Daerah	Rp	1.800.480.000,00
6. Kerjasama Informasi dan media massa	Rp	641.000.000,00
7. Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp	404.900.000,00
8. Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp	2.519.554.000,00
9. Bantuan Hukum	Rp	536.380.000,00
10. Penyusunan dan evaluasi anggaran	Rp	159.573.000
11. penyusunan laporan dan realisasi anggaran	Rp	140.973.000
12. Penyempurnaan sarana dan prasarana fisik dan administrasi pamong praja	Rp	1.883.780.000
13. Pengembangan sistem pelaporan	Rp	2.202.039.000
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	93.295.550.000
15. Fasilitasi permasalahan pertanahan	Rp	100.000.000
16. Percepatan tapal batas wilayah administrasi daerah	Rp	1.663.000.000
17. Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan ijin membuka/ memanfaatkan tanah neqara	Rp	1.500.000.000
18. Ketahanan pangan	Rp	1.071.591.192
19. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	7.162.350.000
20. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	420.000.000
21. Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Rp	638.000.000
22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp	880.931.000
23. Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Rp	800.000.000

WALI KOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI, S. E.

Balikpapan, 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN. FADLI